

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat karena jasa dan pelayanan yang diberikan oleh bank bermanfaat bagi masyarakat. Di masa sekarang, kebutuhan masyarakat akan sumber dana yang diperoleh dari Bank digunakan untuk berbagai macam keperluan. Seperti pembiayaan untuk modal usaha, kesehatan, pendidikan, pembelian aset, dan lain-lain. Dalam hal ini, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur bersaing dengan Bank lainnya dalam hal strategi dan pelayanan terbaik melalui pemberian kredit kepada nasabah yang berpenghasilan tetap maupun tidak. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur menawarkan jasa Kredit Multiguna dengan berbagai macam kemudahan bagi nasabah yang memanfaatkan jasa ini. Sehingga, semakin banyak nasabah yang terbantu akan manfaat Kredit Multiguna, maka akan semakin terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Jika nasabah ingin mendapatkan dana secara cepat dengan jasa pemberian kredit multiguna, nasabah hendaknya melakukan pengajuan permohonan kredit yaitu dengan menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam melakukan pengajuan permohonan kredit multiguna dan mengikuti prosedur secara bertahap yang telah ditetapkan oleh bank. Setelah nasabah mengajukan permohonan kreditnya, pihak bank tentunya akan melakukan analisa kredit. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah nasabah tersebut layak untuk mendapatkan kredit dari bank. Disini, peran sistem akuntansi sangat dibutuhkan untuk melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan mulai dari saat pengajuan permohonan kredit multiguna hingga pemberian kredit kepada nasabah, juga menentukan prosedur apa saja yang akan dijalankan saat proses pemberian kredit multiguna. Adapun peran sistem akuntansi juga berguna untuk mengecek kelengkapan dan ketelitian dokumen-dokumen yang telah disiapkan oleh nasabah, karena dikhawatirkan akan terdapat pemalsuan dokumen-dokumen yang dilakukan nasabah pada saat melakukan

pengajuan permohonan kredit multiguna.

Dibalik kemudahan dari pemberian Kredit Multiguna oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Kredit Multiguna memiliki resiko yaitu resiko Kredit Macet. Kredit Macet bisa terjadi apabila nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Jika nasabah tidak mampu melunasi seluruh kewajibannya, maka jaminan yang dijadikan agunan oleh nasabah akan disita oleh bank. Sehingga menyebabkan adanya kredit macet. Oleh karena itu, disini peran pengendalian internal sangat diperlukan dalam meminimalisir resiko yang timbul akibat dari kredit macet.

Untuk meminimalisir adanya resiko Kredit Macet, diperlukan adanya pengendalian internal yang baik dari Bank. Pengendalian internal dapat dikatakan baik apabila terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab setiap divisi, otorisasi dokumen yang dilakukan secara teliti, serta terciptanya praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap divisi yang terkait. Oleh karena itu, dalam pemberian Kredit Multiguna pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, perlu menerapkan suatu pengendalian internal yang baik agar mampu meminimalisir segala bentuk kecurangan dan penyelewengan yang mungkin terjadi dalam proses pemberian Kredit Multiguna. Jika telah tercapai suatu pengendalian internal yang baik, maka pengelolaan kreditnya juga semakin efektif dan mampu mengurangi tingkat kredit macet. Pengendalian Internal dapat dimulai dari saat dilakukannya proses pengajuan kredit hingga pada tahap pemberian kredit.

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisis apakah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur telah melakukan apakah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur telah menerapkan sistem akuntansi yang baik dalam proses pemberian, sehingga dipilihlah judul Laporan Tugas Akhir yaitu “Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Multiguna pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur”.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Sistem Akuntansi

Sistem memiliki peran penting dalam mengolah suatu informasi yang dimiliki oleh perusahaan, dimana dalam sistem tersebut terdapat suatu prosedur yang berisi rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengolah dan memproses informasi tersebut. Setelah itu, informasi tersebut digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Salah satu sistem yang dipakai perusahaan dalam mengolah data keuangan dan administrasi adalah Sistem Akuntansi.

Menurut Mulyadi (2016:23) Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dalam membahas sistem akuntansi, perlu membedakan istilah sistem dengan prosedur. Menurut Mulyadi (2016:4) Sistem merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan menurut Romney, Steinbard (2016:3), Sistem adalah seperangkat dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

Adapun pengertian Prosedur menurut Mulyadi (2016:4), menjelaskan bahwa Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Dari beberapa pengertian sistem akuntansi yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu susunan urutan kegiatan yang dirancang untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dimana, di dalam suatu sistem akuntansi terdapat unsur sistem dan prosedur yang saling berkaitan untuk melaksanakan tujuan yang hendak ingin dicapai.

1.2.2 Pengendalian Internal

Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian pengendalian internal tersebut di atas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara *manual*, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer (Mulyadi, 2016:129)

Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2016:226), pengendalian internal adalah sebuah proses karena menyebar seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen. Pengendalian internal memberikan jaminan memadai-jaminan menyeluruh yang sulit dicapai dan terlalu mahal. Selain itu, sistem pengendalian internal memiliki keterbatasan yang melekat, seperti kelemahan terhadap kekeliruan dan kesalahan sederhana, pertimbangan dan pembuatan keputusan yang salah, pengesampingan manajemen, serta kolusi.

Tujuan sistem pengendalian internal menurut Mulyadi adalah :

1. Menjaga aset organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Pengendalian internal akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditor yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian internal administratif, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. (Mulyadi, 2016:130)

Menurut Mulyadi (2016:130). Unsur pokok sistem pengendalian internal adalah:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

1.2.3 Kredit

1.2.3.1 Pengertian Kredit dan Pembiayaan

Menurut Undang Undang nomor 10 tahun 1998, Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir,2016:85).

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama (Kasmir, 2016:85).

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman (Kasmir, 2016:86).

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun, faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utamanya kredit macet walaupun sebagian terbesar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan (Kasmir, 2016:86).

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dulu penyebabnya. Jika memang masih bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau memperpanjang jangka waktunya. Namun, jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali, maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang dijaminan oleh nasabah. (Kasmir, 2016:86).

1.2.4 Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh Bank atau lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan. Dalam pemberian kredit harus dilihat dari berbagai unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2016:86) adalah:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka waktu menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

1.2.5 Tujuan dan Fungsi Kredit

1.2.5.1 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Menurut Kasmir (2016:88) tujuan utama pemberian kredit antara lain :

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa

dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat banyaknya kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

1.2.5.2 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2016:89) kredit memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran uang.
Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, terutama bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun

pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

1.2.6 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2016:100), Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit yang akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup :

- Jumlah uang yang akan diterima
- Jangka waktu kredit
- Dan biaya-biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan *team*. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian kredit lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- Dengan melalui notaris.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu:

- Sekaligus, atau
- Secara bertahap.

1.3 Kredit Multiguna

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dibidang perbankan, terutama di wilayah Jawa Timur. Hingga kini, Bank mempunyai peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat, karena jasa dan pelayanan yang diberikan oleh bank bermanfaat bagi masyarakat. Sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, definisi Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini, Bank bertugas mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat dengan berbagai macam tujuan. Seperti melayani pembuatan rekening baru, pembayaran dana kepada

organisasi atau perusahaan terkait (pendidikan, kesehatan, pajak) dan lain-lain. Selain itu, Bank juga melayani masyarakat yang ingin mendapatkan dana dari Bank guna untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu Kredit Multiguna.

Kredit Multiguna merupakan salah satu fasilitas pelayanan pemberian kredit yang dimiliki oleh bank dimana nasabah harus memberikan jaminan/agunan kepada bank. Jika nasabah tidak memiliki jaminan, maka nasabah tidak mampu melakukan pengajuan kredit multiguna. Di masa sekarang, tidak dipungkiri bahwa masyarakat memiliki kebutuhan yang bermacam-macam dan sifatnya material. Kredit Multiguna memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan untuk masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap atau tidak tetap, seperti pembiayaan untuk modal usaha, pendidikan, kesehatan, pembelian aset, dan lain-lain. Bank memberikan kemudahan bagi nasabah yang melakukan pengajuan Kredit Multiguna sesuai dengan agunan yang dimiliki, jangka waktu peminjaman dan nominal pinjaman yang diinginkan oleh nasabah. Dibalik kemudahan pelayanan dalam pemberian Kredit Multiguna kepada nasabah, tentunya pihak Bank harus teliti dalam menganalisis dokumen nasabah pada saat proses pemberian kredit untuk meminimalisir adanya kredit macet.

Manfaat dari pemberian kredit multiguna kepada nasabah adalah untuk memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin mendapatkan dana secara cepat untuk membiayai kebutuhan yang bersifat material. Bagi pihak Bank, dengan adanya fasilitas Kredit Multiguna mampu meningkatkan jumlah nasabah yang ingin memanfaatkan fasilitas ini apabila pelayanan dan jasa yang diberikan cepat dan tepat.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui implementasi sistem yang dipakai oleh perusahaan dalam hal pengendalian internal
2. Mengetahui prosedur yang terjadi dalam proses pengajuan dan pemberian kredit multiguna

3. Mengetahui Sistem Akuntansi dan Pengendalian Internal pada Pemberian Kredit Multiguna.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

1. Bagi Penulis

Manfaat penulisan Tugas Akhir bagi penulis adalah:

- a. Memenuhi tugas mata kuliah Tugas Akhir (TA) sebagai prasyarat kelulusan Program Studi DIII Akuntansi Universitas Airlangga
- b. Membandingkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan ilmu yang didapat di tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, yaitu di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

2. Bagi Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Airlangga

Manfaat penulisan Tugas Akhir bagi Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Airlangga adalah:

Meningkatkan kualitas lulusan dan sebagai literatur bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Airlangga

3. Bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Manfaat penulisan Tugas Akhir bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah:

Memberikan tambahan informasi dan juga masukan yang baik guna mencapai efektifitas dan efisiensi pengendalian internal terhadap kredit multiguna

1.6 Rencana Tugas Akhir

a. Objek Tugas Akhir

Topik : Sistem Akuntansi (Pemberian Kredit Multiguna)

b. Subjek Tugas Akhir

Nama : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Alamat : Jl. Mayjen Prof. Dr.Moestopo no. 6-8 Surabaya

c. Jadwal Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang DR Soetomo Surabaya dimulai dari tanggal 02 Januari s/d 13 Februari 2020. Hari pelaksanaan PKL sesuai dengan hari efektif kerja perusahaan (Senin-Jumat). Untuk jam kerja PKL sesuai dengan jam kerja efektif mulai pukul 08.00 hingga 16.30 WIB. Adapun tabel kerja PKL ditampilkan pada tabel 1.1

Pada tabel 1.1, dijabarkan mengenai rangkaian kegiatan yang dilakukan mulai bulan September 2019 hingga Juni 2020. Dimulai dari bulan September 2019, penulis melakukan pengajuan ijin PKL pada Bank Jatim Kantor Cabang Dr. Soetomo Surabaya. Lalu pada bulan Oktober 2020, penulis melakukan pengajuan dengan membawa surat pengajuan PKL dan Proposal Pengajuan PKL

Penulis melaksanakan PKL pada bulan Januari 2020 hingga minggu kedua bulan Februari 2020. Pada bulan Januari 2020, terdapat kegiatan pembagian dosen pembimbing untuk penyusunan laporan PKL dan Tugas Akhir. Pada bulan Februari hingga Mei 2020, terdapat kegiatan penyusunan laporan PKL dan Tugas Akhir. Lalu pada bulan Juni 2020 adalah pengumpulan laporan PKL dan revisi Tugas Akhir.

**Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2019-2020**

No	Kegiatan	September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		2019				2019				2019				2019				2020				2020				2020				2020				2020				2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan ijin lokasi PKL	■																																							
2	Pengajuan Proposal PKL ke Perusahaan		■																																						
3	Pelaksanaan PKL																	■	■	■	■																				
4	Pembagian Dosen Pembimbing																					■	■	■	■																
5	Penyusunan Laporan PKL																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Bimbingan Laporan PKL																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Pengumpulan Laporan PKL																																								■
8	Penyerahan Revisi Laporan PKL																																								■